

KEDUDUKAN DAN STATUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI DI DENMARK DAN INDONESIA

Mawaddah A.^(1*), Hamsu Abdul Gani⁽²⁾, Purnamawati⁽³⁾

^{(1)*}Pendidikan Teknologi Kejuruan, Universitas Negeri Makassar, mawaddahaspar.4.4@gmail.com

⁽²⁾ Pendidikan Teknologi Kejuruan, Universitas Negeri Makassar, hamsuabdulgani@yahoo.com

⁽³⁾ Pendidikan Teknologi Kejuruan, Universitas Negeri Makassar, purnamawati@unm.ac.id

ABSTRACT

This research is part of a literature review on the position and status of vocational education and training in Denmark and compares it with vocational education in Indonesia. This research uses a literature research method that is organized systematically, so as to produce quality output. The sources of this literature study are articles totaling 11 articles and government regulations or laws totaling 2 regulations. Based on the results of the review with the help of references, it can be concluded that the 2014 reform in vocational education in Denmark has not been able to approach the target of the desired achievement including the efforts made do not make VET in Denmark attractive to young people. In contrast to Indonesia where every year vocational school enrollment is increasing considering that the opportunities to be ready to work in vocational schools are very large but this is not supported by adequate resources and infrastructure, implementation of regulations that have not been implemented properly and other things that make the learning process ineffective.

Keywords: VET, Vocational Education, 2014 reform

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan bagian dari review literatur mengenai kedudukan dan status pendidikan dan pelatihan vokasi di Denmark serta membandingkan dengan pendidikan vokasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang disusun dengan sistematis, sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Sumber dari studi literatur ini berupa artikel yang berjumlah 11 artikel dan peraturan pemerintah atau undang-undang sebanyak 2 peraturan. Berdasarkan hasil review dengan dibantu oleh referensi dapat ditarik kesimpulan, bahwa reformasi 2014 pada pendidikan kejuruan di Denmark belum mampu mendekati target dari pencapaian yang diinginkan termasuk upaya-upaya yang dilakukan tidak membuat VET di Denmark diminati oleh kaum muda. Berbeda dengan Indonesia yang setiap tahunnya pendaftar sekolah kejuruan semakin meningkat mengingat bahwa peluang untuk siap kerja pada sekolah kejuruan sangat besar tetapi hal tersebut tidak didukung oleh sumber daya dan infrastruktur yang memadai, implementasi peraturan yang belum dilaksanakan dengan baik serta hal-hal lainnya yang membuat proses pembelajaran tidak efektif.

Kata Kunci: VET, Pendidikan Kejuruan, reformasi 2014

LATAR BELAKANG

Kualitas pendidikan sangat diperlukan hal ini berkaitan dengan terciptanya manusia yang cerdas dan terdidik untuk membangun masa depan. Pendidikan diharapkan dapat membuka potensi siswa serta mengetahui pemecahan masalah yang akan datang. Untuk memenuhi kebutuhan manusia berkaitan dengan pendidikan reformasi terus dilakukan baik itu secara global dan nasional.

Di Indonesia pendidikan telah ada sejak masa pendudukan Belanda dengan tujuan sebagai

bentuk dari kebijakan politik etis yang Belanda terapkan. Reformasi pendidikan di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan B.J. Habibie tahun 1998, kebijakan pendidikan baru bersifat reformatif dan revolusioner, termasuk mengubah kurikulum menjadi berbasis kompetensi (Khaeruddin dan Rahmania, 2022). Pendidikan di Indonesia khususnya di sekolah menengah terbagi menjadi SMA dan SMK, dalam artikel ini akan berfokus pada SMK atau pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan atau vokasi di Indonesia telah ada sebelum merdeka, Belanda

menyelenggarakan pendidikan vokasi pertama kali dan dinamakan Institut Teknologi Bandung (ITB) terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan revolusi pada dunia pendidikan. Pendidikan kejuruan sebelum kemerdekaan dibagi menjadi empat bidang keahlian, yaitu sekolah kewanitaan, teknik, pertanian dan perdagangan (Suharno. et al, 2020). Pada priode tersebut pendidikan kejuruan sampai dengan tahun 1998 dinamai sekolah teknik menengah (STM).

Sistem pendidikan di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam rangka pemenuhan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya. Saat ini pendidikan kejuruan terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi yang terbaru agar dapat menciptakan *human resources* yang berkualitas sesuai dengan potensi keahlian yang dimiliki. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada sekolah pun telah tergolong baik (Purnamawati. et al, 2019).

Dengan berkembangnya pendidikan kejuruan di Indonesia, banyak bermunculan tantangan-tantangan seperti pendirian sekolah kejuruan yang tidak terkendali dimana keahlian tertentu mendominasi dan tidak melihat lingkungan dari daerah pendirian sekolah kejuruan, yang mengakibatkan potensi yang ada di daerah tidak dikembangkan melalui sarana pendidikan kejuruan. Dengan begitu banyaknya permasalahan tersebut membuat pemerintah terus berupaya meningkatkan pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia dan mencari jalan keluar terbaik mengenai hal tersebut.

Tidak hanya di Indonesia masalah yang muncul pada pendidikan kejuruan terjadi di beberapa negara termasuk negara Denmark. Sistem pendidikan di Denmark khususnya pendidikan kejuruan atau vokasi menganut sistem ganda dan telah digunakan sejak *Vocational Education and Training (VET)* diperkenalkan pada tahun 1956. Sistem ganda yang digunakan Denmark memiliki peluang belajar yang sangat besar dikarenakan pembelajaran di sekolah dan ditempat magang dikombinasikan.

Pada tahun 2014 kementerian pendidikan Denmark menetapkan program kerangka kerja untuk pengembangan sekolah kejuruan (Low dan Katznelson, 2019) reformasi tersebut dinamakan "*Better and more attractive vocational education and training*".

VET di Denmark berfokus kepada kaum muda dan dari penyusunan reformasi 2014 tentang pendidikan vokasi mencakup beberapa target yang diharapkan dapat meningkatkan *VET* di Denmark. Hal tersebut dilakukan mengingat pendidikan kejuruan di Denmark kurang diminati oleh kaum muda sedangkan pendidikan umum memiliki peminat yang banyak dikarenakan faktor pengaruh lingkungan yang menganggap program *VET* tidak cukup bergengsi.

Dari kedudukan pendidikan vokasi yang ada di Denmark dalam artikel ini akan disandingkan dengan pendidikan vokasi atau kejuruan yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode studi literatur digunakan dalam karya ini dan termasuk studi kepustakaan dengan judul artikel *The Standing And Status Of Vocational Education And Training In Denmark* (Aarkrog, 2020) yang digunakan sebagai kajian utama. Kumpulan data lain dari koleksi jurnal online yang dapat diakses melalui internet dan digunakan sebagai referensi terkait tema serta topik yang dibahas dan selanjutnya akan dianalisa.

Kriteria dari artikel maupun jurnal yang dijadikan sebagai bahan referensi merupakan artikel ilmiah dengan kemutahiran 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022. Langkah awal dari penelitian ini dengan mengumpulkan hasil penelitian sebelumnya berupa artikel internasional kemudian menambahkan data pendukung yang diambil dari artikel bereputasi serta undang-undang dan peraturan pemerintah.

Selanjutnya informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan apa yang dikaji. Sumber dari studi literatur ini berupa artikel yang berjumlah 11 dan peraturan pemerintah atau undang-undang sebanyak 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil review artikel mengenai kedudukan dan status pendidikan dan pelatihan vokasi di Denmark, hasil literatur yang dilakukan menjelaskan value dari pelajar di Denmark yang melanjutkan pendidikan menengah atas kesekolah kejuruan terus menurun. Dua hal yang mempengaruhi keadaan tersebut yaitu jumlah siswa yang mendaftar dalam program *VET* sedikit dan siswa banyak yang tidak menyelesaikan program studi mereka. Hal tersebut dikarenakan pengaruh lingkungan yang menganggap program *VET* tidak cukup bergengsi.

Mengenai sistem *VET* di Denmark, program *VET* di Denmark diselenggarakan di empat jenis perguruan tinggi *VET*: perguruan tinggi pertanian, komersial, teknis dan sosial & perawatan kesehatan. Dengan mencakup sekitar 102 program, yang selanjutnya dibagi menjadi 300 spesialisasi. *VET* Denmark menggunakan sistem prinsip ganda, dimana siswa memulai program *VET* dengan kursus dasar yang sebagian besar berlangsung di salah satu dari empat jenis perguruan tinggi *VET*.

Prinsip ganda yang diadopsi Denmark sejak 1956, terus bereformasi sampai pada tahun 2014 yang menjadi inisiatif mendukung perluasan *VET*. Cakupan dari empat target reformasi tersebut sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan siswa baru pada *VET* lebih banyak.
2. Lebih banyak siswa yang harus meningkatkan penyelesaian program *VET*.
3. *VET* harus menantang semua siswa untuk menjadi terampil mungkin.
4. Kepercayaan terhadap *VET* dan kesejahteraan siswa di perguruan tinggi *VET* harus diperkuat.

Sebagai upaya dalam mendukung pendidikan vokasi pemerintah Denmark melakukan reformasi terkait *VET* kebijakan serta asumsi dalam reformasi pendidikan vokasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bimbingan dan konseling dalam kaitannya dengan *VET* harus diperkuat. Pemerintah Denmark mengadakan kursus untuk memperkenalkan *VET*, reformasi tersebut menetapkan bahwa penyediaan bimbingan

harus melibatkan kerja sama yang erat antara konselor di pusat-pusat bimbingan kota dan guru-guru di sekolah menengah.

2. Kaum muda perlu waktu untuk mengambil keputusan tentang pilihan pendidikan, menjadi salah satu faktor tingginya angka putus sekolah dikarenakan memerlukan waktu untuk mengambil keputusan tentang pilihan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan waktu penyelesaian studi sekolah umum hanya 3 tahun sedangkan kejuruan lebih lama.
3. Persyaratan penerimaan terlalu longgar, *VET* di Denmark memiliki reputasi inklusif dalam artian bahwa siapa pun memiliki hak untuk mendaftar dalam program *VET* setelah menyelesaikan pendidikan menengah bawah yang menyebabkan kurangnya prestise.
4. *VET* membutuhkan lingkungan belajar yang berorientasi pada kaum muda, tantangan yang harus dihadapi pemerintah Denmark yaitu, menentukan karakteristik lingkungan ini, tujuannya adalah untuk membangun lingkungan pendidikan kaum muda vokasi dan dengan demikian secara jelas membedakan lingkungan belajar di perguruan tinggi *VET* dari yang ada di sekolah menengah atas.
5. Transisi ke pendidikan tinggi membuat *VET* lebih menarik, dengan cara memperkuat bimbingan di dalam dan setelah *VET*, menginformasikan kepada siswa tentang kemungkinan rute ke pendidikan tinggi, dan memastikan bahwa baik guru maupun tempat kerja memiliki pengetahuan tentang peluang untuk pendidikan tinggi pasca-*VET*.
6. Kualitas pelatihan harus ditingkatkan, reformasi menyatakan bahwa semua guru harus berpartisipasi dalam pengembangan profesional yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menerapkan instruksi yang berbeda, memperkuat pembelajaran berbasis praktik, dan menggunakan TIK sebagai alat pedagogis. Yang artinya manajemen sekolah harus mengembangkan kompetensi pedagogis formal untuk menerapkan manajemen pedagogis.

7. Pelatihan praktis di tempat kerja, magang menjadi salah satu faktor motivasi para siswa ketika mendaftar *VET* untuk mempermudah siswa dalam mengajukan permohonan magang pemerintah Denmark mengalokasikan dana ke perguruan tinggi *VET* untuk lebih mengembangkan kerjasama dengan industri.

Berbagai kebijakan dalam reformasi yang dibuat oleh pemerintah Denmark namun hal tersebut tampaknya belum berhasil meskipun telah dilakukannya transisi pendidikan kejuruan. Faktor utama yang paling mempengaruhi hal tersebut adalah jumlah peminat *VET* yang kurang ditambah angka putus sekolah yang tinggi pada jenjang pendidikan vokasi. Hal tersebut terjadi bukan karena sistem dan sarana yang ada dalam *VET* Denmark tetapi fakta bahwa kaum muda lebih memilih melanjutkan pendidikan di sekolah umum yang menjadi alasan utamanya.

Kondisi Pendidikan Vokasi di Denmark dan Indonesia

Perkembangan pendidikan kejuruan di Indonesia mengalami pasang surut yang dinamis, meskipun demikian terbukti beberapa tahun terakhir pendidikan kejuruan di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang, berdasarkan data dari Direktorat Pendidikan kejuruan tahun 2018 tentang rasio SMA:SMK mencapai 49%:51% (Suharno et al, 2020).

Hal ini membangkitkan minat umum, terutama di kalangan siswa yang ingin melanjutkan studi mereka di sekolah kejuruan.

Tantangan utama bagi pemerintah terhadap pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia adalah bagaimana pemerintah dapat mengelola dan menjamin mutu lulusan agar para lulusan pendidikan kejuruan mendapatkan tempat untuk mengimplementasikan pembelajaran yang telah di ajarkan di sekolah.

Banyaknya perbedaan antara pendidikan kejuruan di dalam negeri dan di luar negeri mengharapakan pemerintah dapat menyortir dengan baik hal-hal yang dapat dijadikan contoh. Sebagai salah satu contohnya berikut merupakan beberapa temuan tentang

perbedaan pendidikan vokasi di Denmark dan di Indonesia:

Table 1. Sistem Yang Digunakan

Denmark	Indonesia
<i>Dual Model</i>	<i>Link and Match</i>

Sumber: (Aarkrog, 2020 & Precalya dan Darwan, 2021)

Berdasarkan sistem yang digunakan program pendidikan kejuruan Denmark menggunakan sistem ganda yaitu kombinasi *school-based* dan *workplace training* yaitu para siswa akan mendapatkan pembelajaran kejuruan dan umum selama 6-12 bulan kemudian mengajukan permohonan magang setelah itu pembelajaran dilakukan bergantian antara pelatihan di industri dan pembelajaran berbasis sekolah.

Sedangkan di Indonesia menggunakan program dengan konsep *link and match*, yaitu menjadikan peserta didik menjadi *human capital* yang siap menjadi tenaga terampil potensial melalui kurikulum yang diajarkan di lembaga pendidikan (Precalya dan Darwan, 2021).

Konsep *link and match* nyatanya belum dijalankan dengan baik terbukti dengan hanya terdapat beberapa industri yang siap melakukan kerja sama dengan SMK secara konsisten dan berkesinambungan.

Table 2. Program Keahlian

Denmark	Indonesia
102 Program	44 Program

Sumber: (Aarkrog, 2020)

Berdasarkan program keahlian terdapat perbandingan yang sangat jauh antara program keahlian pendidikan kejuruan yang ada di Denmark dan Indonesia. Denmark memiliki 102 program keahlian dengan 300 spesialisasi dan program keahlian di Indonesia berjumlah 44 program. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 024/H/KR/2022 tentang konsentrasi keahlian SMK/MAK pada kurikulum merdeka.

Table 3. Tujuan

Denmark	Indonesia
Pekerja terampil	Mempersiapkan lulusan terjun ke dunia kerja

Sumber: (Aarkrog, 2020 & Harahap dan Kadir 2020)

Berdasarkan tujuan pendidikan kejuruan di Denmark memiliki tujuan para lulusan untuk menjadi pekerja terampil serta melibatkan siswa dalam pengembangan masyarakat yang demokratis. Tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, yang memiliki tujuan mempersiapkan lulusannya untuk terjun ke dunia kerja/ industri yang memiliki keahlian serta memenuhi kebutuhan masyarakat (Harahap dan Kadir, 2020).

Table 4. Sarana dan Prasarana

Denmark	Indonesia
Merata dan Modern	Tidak merata

Sumber: (Aarkrog, 2020 & Zakiyawati dan Trihantoyo, 2021)

Berdasarkan tabel untuk sarana dan prasarana yang terdapat pada sekolah kejuruan di Denmark menggunakan alat-alat yang modern dan merata disetiap sekolah, sementara di Indonesia pemerataan sarana dan prasarana belum terlaksana dengan baik secara kualitas maupun kecanggihannya.

Meskipun demikian pemerintah mengeluarkan Permendiknas Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan yang membahas mengenai kondisi ideal sarana dan prasarana (Zakiyawati dan Trihantoyo, 2021).

Table 5. Penyelesaian Studi

Denmark	Indonesia
3,5-5 tahun	3-4 tahun

Sumber: (Aarkrog, 2020 & Andri dan Yulia, 2020)

Berdasarkan penyelesaian studi pendidikan kejuruan di Indonesia normalnya membutuhkan waktu 3 tahun, hal ini

dijelaskan dengan dilaksanakannya program wajib belajar 12 di Indonesia yang dimana menurut Andri & Yulia (2020) di Indonesia, upaya telah dilakukan untuk mencanangkan program pendidikan universal 12 tahun untuk menjangkau usia produktif. Tetapi terdapat pula beberapa program keahlian yang penyelesaian studinya sampai dengan 4 tahun. Sedangkan di Denmark memerlukan waktu 3,5-5 tahun bahkan lebih untuk menyelesaikan program studi.

Table 6. Pembiayaan

Denmark	Indonesia
Pemerintah dan Industri	BOS dan APBDN

Sumber: (Aarkrog, 2020 & Khurniawan dan Majid, 2019)

Berdasarkan pembiayaan dalam pendidikan kejuruan baik di Indonesia maupun Denmark sama-sama langsung di biayai oleh pemerintah. Pemerintah Denmark secara khusus membiayai secara langsung dengan cara bekerja sama dengan industri. Di Indonesia pembiayaan ditanggung sepenuhnya dari BOS dan APBDN (Khurniawan dan Majid, 2019).

Table 7. Penerimaan Siswa Baru

Denmark	Indonesia
Setelah tamat sekolah menengah pertama	Maksimal berusia 21 tahun

Sumber: (Aarkrog, 2020 & Jørgensen. et al, 2019)

Berdasarkan Kegiatan penerimaan siswa baru pada program pendidikan kejuruan di Denmark tidak memiliki batasan usia (diselesaikan setelah usia 25 tahun), namun pendidikan kejuruan di Denmark berfokus pada pengaktifan kaum muda dalam VET (Jørgensen. et al, 2019) yang berusia 16-25 tahun. Dan untuk di Indonesia berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terkait batas usia minimal dan maksimal peserta didik jenjang TK-SMA/SMK menerangkan bahwa calon peserta didik baru sekolah kejuruan memiliki batasan maksimal berusia 21 tahun.

KESIMPULAN

Kedudukan dan status pendidikan kejuruan di Denmark mengalami reformasi yang sangat diharapkan dapat mengubah dan memajukan pendidikan kejuruan yang ada di negara tersebut. Reformasi yang telah digagas pada tahun 2014 yang diharapkan mampu mencapai empat target dalam kemajuan pendidikan kejuruan di Denmark dan berfokus pada kaum muda serta kebijakan dan asumsi dalam reformasi tersebut belum mampu mendekati target dari pencapaian yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya reformasi 2014 adalah jumlah peminat VET yang kurang ditambah angka putus sekolah yang tinggi pada jenjang pendidikan vokasi. Hal tersebut terjadi bukan karena sistem dan sarana yang ada dalam VET tetapi fakta bahwa kaum muda lebih memilih melanjutkan pendidikan di sekolah umum yang menjadi alasan utamanya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Denmark, mulai dari pemberian bimbingan dan konseling kepada siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke sekolah kejuruan, mengatur penerimaan siswa baru, lingkungan belajar yang diubah menjadi nyaman mungkin, melakukan transisi pendidikan menjadi lebih menarik, kualitas dari pelatihan yang terus ditingkatkan serta pelatihan praktis yang dilakukan di tempat kerja belum mampu menarik perhatian kaum muda untuk melanjutkan pendidikannya ke arah vokasi.

Berbeda dengan Indonesia setiap tahunnya pendaftar sekolah kejuruan semakin meningkat mengingat bahwa peluang untuk siap kerja pada sekolah kejuruan sangat besar tetapi hal tersebut tidak didukung oleh sumber daya dan infrastruktur yang memadai, implementasi peraturan yang belum dilaksanakan dengan baik serta hal-hal lainnya yang membuat proses pembelajaran tidak efektif. Namun diharapkan pendidikan vokasi yang ada di Indonesia mampu mengadaptasi program dan peningkatan mutu dari pendidikan kejuruan yang ada di luar negeri serta *link and match* yang telah digunakan mampu untuk dikembangkan dan benar-benar terimplementasi pada dunia pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aarkrog, V. (2020). The standing and status of vocational education and training in

Denmark. *Journal of Vocational Education and Training*, 72(2), 170–188.

<https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1717586>

Andri Wicaksono, & Yulia Siska. (2020, January 10). *Wajib Belajar 12 Tahun Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU)*.

Harahap, Z., & Kadir, Muh. A. (2020). Tourism Human Resource Development In Vocational Education. *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*, 8(1), 63–76.

<https://doi.org/10.36983/japm.v8i1.96>

Jørgensen, C. H., Järvinen, T., & Lundahl, L. (2019). A Nordic transition regime? Policies for school-to-work transitions in Sweden, Denmark and Finland. *European Educational Research Journal*, 18(3), 278–297. journals.sagepub.com/home/eer

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan KEMENDIKBUDRISTEK Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.

Khaeruddin, & Rahmania. (2022). Era reformasi: Titik balik pendidikan Indonesia. *Nubin Smart Journal*, 2(2), 16–25.

<https://ojs.nubinsmart.id/index.php/njs>

Khurniawan, A. W., & Majid, Muh. A. (2019). Analisis Ketercukupan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. *Vocatioal Education Policy, White Paper*, 1(2), 1–19. <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/17780>

Louw, A., & Katznelson, N. (2019). Transfer and reflection in the Danish dual model: Findings from development projects in the Danish vocational education and training programmes. *Nordic Journal of Vocational Education and Training*, 9(2), 51–70. <https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199251>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/Permendikbud/2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tamatan Kanak-kanak, Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

- Precalya, H. M., & Darwan. (2021). Link And Match Pendidikan Sebagai Ideologi Neoliberalisme (Analisis Wacana Tentang Dominasi Elit Dalam Pendidikan Kejuruan Di Indonesia). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4), 1416–1425. <http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2561>
- Purnamawati, Arfandi, & Nurfaeda. (2019). The level of use of information and communication tchnology at vocational high school. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 9(3), 249–257.
- Suharno, Pambudi, N. A., & Harjanto, B. (2020). Vocational education in Indonesia: History, development, opportunities, and challenges. *Children and Youth Services Review*, 115. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105092>
- Zakiyawati, S. W., & Trihantoyo, S. (2021). Urgensi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9(1), 200–214. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/index>.